

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

- 1. UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1981 TENTANG UNIT METROLOGI LEGAL;**
- 2. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN;**
- 3. UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;**
- 4. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;**
- 5. UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;**
- 6. PERATURAN PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 1985 TENTANG WAJIB DAN PEMBEBASAN UNTUK DITERA DAN/ATAU DITERA ULANG SERTA SYARAT BAGI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA;**
- 7. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 115 TAHUN 2018 TENTANG UNIT METROLOGI LEGAL;**
- 8. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 67 TAHUN 2018 TENTANG ALAT UTP YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG;**
- 9. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 68 TAHUN 2018 TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA;**
- 10. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SYARAT TEKNIS PENGUJIAN UTP**